

**Edukasi Pemahaman Fraud Awareness dan Audit Internal Sederhana dalam
Pengelolaan Keuangan Koperasi Warga**

***Education on Fraud Awareness and Basic Internal Auditing in the Financial
Management of Community Cooperatives***

Keri Boru Hotang*¹, Nabilah Fary Adiyana², Yusuf Faisal³

^{1, 2, 3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti, Bekasi, Indonesia

*Email corresponding: keriboruhotang@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi Warga memiliki peran krusial sebagai bantalan ekonomi komunitas di tingkat Rukun Warga (RW), namun sering kali rentan terhadap ancaman *fraud* akibat lemahnya sistem kontrol internal dan keterbatasan literasi akuntansi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengedukasi jajaran pengurus, dewan pengawas, dan anggota mengenai *Fraud Awareness* serta melatih keterampilan audit internal sederhana berbasis instrumen lembar periksa (*checklist*). Menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) terhadap 25 peserta, lokakarya ini menyimulasikan investigasi bukti transaksi fiktif secara langsung. Hasil evaluasi menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada skor kognitif peserta dari 32,5 menjadi 87,75, diiringi keberhasilan 88% perwakilan warga dalam mengeksekusi audit secara mandiri tanpa kesalahan. Secara sosiologis, pemulihan transparansi ini sukses merestorasi kepercayaan tim, menumbuhkan integritas pimpinan agar tidak disangka sekadar menyuruh-nyuruh, serta mengatasi pasivitas pengawas yang sebelumnya harus ditegur berkali-kali untuk mengevaluasi laporan. Kesimpulannya, instrumen audit internal sederhana terbukti ampuh menutup celah manipulasi kas dan membangkitkan iklim gotong royong yang akuntabel.

Kata kunci: *Fraud Awareness*, Audit Internal, Koperasi Warga, Integritas, *Checklist* Syariah

ABSTRACT

Neighborhood Cooperatives (Koperasi Warga) play a crucial role as an economic cushion for communities at the neighborhood level, yet they are frequently vulnerable to fraud threats due to weak internal control systems and limited accounting literacy. This Community Service (PKM) activity aims to educate the management board, supervisory board, and members regarding Fraud Awareness and to train them in simple internal audit skills utilizing a checklist instrument. Employing the Participatory Action Research (PAR) method with 25 participants, this workshop simulated the investigation of fictitious transaction evidence firsthand. Evaluation results demonstrated a significant surge in the participants' cognitive score from 32.5 to 87.75, accompanied by the success of 88% of community representatives in executing independent audits without errors. Sociologically, the restoration of transparency successfully rebuilt team trust, cultivated the integrity of leaders so they are not perceived as merely giving orders, and overcame the passivity of supervisors who previously had to be reprimanded repeatedly to evaluate reports. In conclusion, the simple internal audit instrument is proven effective in closing loopholes for cash manipulation and awakening an accountable spirit of mutual cooperation.

Keywords: Fraud Awareness, Internal Audit, Neighborhood Cooperative, Integrity, Checklist

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia secara historis dan konstitusional diamanatkan sebagai soko guru perekonomian nasional yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong. Sebagai entitas ekonomi yang berbasis pada keanggotaan, koperasi memainkan peran krusial dalam

mendistribusikan kesejahteraan yang berkeadilan dan mereduksi ketimpangan ekonomi di tingkat akar rumput (Kusuma & Hidayat, 2024). Berbeda dengan korporasi kapitalis yang bermuara pada akumulasi laba bagi segelintir pemegang saham, koperasi menempatkan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga perputaran modal terjadi dari, oleh, dan untuk komunitas itu sendiri.

Dalam konstelasi kondisi ekonomi saat ini, peran koperasi menjadi semakin krusial sebagai bantalan ketahanan finansial masyarakat dalam menghadapi berbagai turbulensi makroekonomi. Ketidakpastian pemulihan ekonomi global, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta ancaman inflasi yang menggerus daya beli kelas menengah ke bawah memaksa masyarakat untuk mencari alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau (Wijaya et al., 2026). Di tengah maraknya jeratan pinjaman *online* (pinjol) ilegal yang mematikan, entitas keuangan komunal ini menjadi oase pelindung bagi perekonomian rumah tangga.

Secara spesifik, Koperasi Warga yang beroperasi di tingkat Rukun Warga (RW) atau lingkungan perumahan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pengaman sosial-ekonomi skala mikro. Koperasi jenis ini umumnya memfasilitasi simpan pinjam skala kecil untuk keperluan darurat kesehatan, pendidikan anak, hingga penambahan modal usaha mikro bagi ibu rumah tangga (Sari & Anwar, 2025). Kedekatan geografis dan ikatan sosiologis antaranggota menjadikan proses pencairan dana di koperasi warga sangat cepat dan birokrasinya tidak serumit perbankan formal.

Secara yuridis, eksistensi dan tata kelola koperasi berpijak kuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Regulasi payung ini secara tegas menggarisbawahi bahwa koperasi harus dikelola secara demokratis, mandiri, dan bertujuan utama memajukan kesejahteraan anggota (Wibowo & Hasanah, 2026). Undang-undang ini menuntut adanya integritas dan profesionalisme dari jajaran pengurus dalam mengelola aset dan kas yang sepenuhnya merupakan uang titipan dari warga sekitar.

Lebih lanjut, pedoman operasional yang menjamin kesehatan finansial koperasi diatur secara teknis melalui berbagai Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM), salah satunya terkait standar pemeriksaan kelembagaan, usaha, dan keuangan koperasi. Regulasi ini mengamanatkan bahwa setiap koperasi wajib menyelenggarakan sistem pembukuan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Nugroho & Putra, 2025). Kehadiran regulasi ini dirancang untuk mencegah terjadinya malapraktik pengelolaan dana yang dapat merugikan anggota.

Ekspektasi dari serangkaian instrumen regulasi tersebut bermuara pada tuntutan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik di dalam tubuh koperasi. Prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*) mutlak harus diterapkan agar koperasi warga tidak sekadar menjadi ajang kumpul-kumpul sosial, melainkan lembaga keuangan mikro yang kredibel (Pratama & Susanti, 2025). Akuntabilitas ini sangat penting untuk menjaga marwah kepengurusan agar tidak memunculkan prasangka buruk di antara tetangga.

Namun, fenomena empiris di lapangan sering kali memperlihatkan anomali yang bertolak belakang dengan idealisme tata kelola dan regulasi tersebut. Mayoritas pengurus koperasi warga dipilih berdasarkan asas ketokohan, senioritas, atau kedekatan sosiosial di lingkungan tempat tinggal, bukan berlandaskan pada rekam jejak kompetensi literasi finansial atau akuntansi (Fauziah & Santoso, 2024). Minimnya latar belakang profesional ini memicu kebingungan struktural saat pengurus dituntut untuk menyajikan neraca keuangan dan laporan arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Kondisi mismanajemen dan lemahnya kontrol internal ini kemudian melahirkan fenomena gelap yang sangat mengkhawatirkan, yakni maraknya kasus *fraud* (kecurangan) di tingkat koperasi warga. Fenomena *fraud* ini bermanifestasi dalam berbagai modus operandi, mulai dari penggelapan dana kas kecil, rekayasa laporan pembukuan bulanan, hingga penyaluran kredit fiktif menggunakan nama warga yang tidak pernah meminjam (Lestari & Rahman, 2025). Tidak jarang, uang tabungan warga yang dikumpulkan bertahun-tahun lenyap begitu saja tanpa kejelasan rekam jejak.

Jika ditelaah melalui kacamata teori *Fraud Triangle*, praktik kecurangan di tubuh koperasi warga ini meledak akibat bertemunya tiga elemen destruktif: tekanan finansial pribadi pengurus (*pressure*), rasionalisasi bahwa dana tersebut hanya "dipinjam sementara" (*rationalization*), serta lemahnya sistem pengawasan yang membuka celah kejahatan (*opportunity*) (Setiawan & Fitriani,

2026). Ketika pengurus mengetahui bahwa tidak ada satupun anggota warga yang paham cara membaca laporan keuangan, probabilitas terjadinya penyalahgunaan wewenang akan meningkat secara eksponensial.

Dampak yang ditimbulkan dari praktik kecurangan ini tidak hanya meluluhlantakkan fondasi ekonomi warga, tetapi juga merusak kohesi sosial di dalam komunitas. Kebangkrutan koperasi akibat *fraud* secara langsung memicu ledakan konflik horizontal antarwarga, menghancurkan tingkat kepercayaan (*trust*) yang telah terbangun puluhan tahun, dan menciptakan trauma psikologis untuk kembali berorganisasi (Utami & Firmansyah, 2024). Restorasi kepercayaan pasca-skandal keuangan komunal jauh lebih sulit dilakukan dibandingkan sekadar mengumpulkan kembali modal uang.

Menghadapi ancaman kelumpuhan kelembagaan tersebut, penanaman *Fraud Awareness* (Kesadaran Terhadap Kecurangan) menjadi sebuah urgensi yang tidak dapat ditunda. *Fraud awareness* adalah kemampuan kognitif anggota dan pengurus untuk mengidentifikasi gejala-gejala awal kecurangan (*red flags*), memahami risiko penyimpangan, serta menumbuhkan budaya keberanian untuk mempertanyakan anomali angka dalam laporan bulanan (Rahmawati & Putra, 2025). Kesadaran ini merupakan benteng pertahanan lapis pertama (*first line of defense*) untuk mencegah niat jahat sebelum sempat tereksekusi.

Sayangnya, upaya mitigasi *fraud* ini sering kali terhambat oleh lemahnya fungsi Badan Pengawas Koperasi. Sesuai amanat undang-undang, pengawasan internal sejatinya melekat pada Badan Pengawas yang dibentuk dari anggota. Namun faktanya, anggota pengawas sering kali mengalami inferioritas pengetahuan dan bertindak hanya sebagai "tukang stempel" atas laporan pengurus tanpa melakukan pengujian bukti transaksi fisik (Siregar & Susanto, 2024). Kelumpuhan fungsi audit ini menjadikan siklus RAT kehilangan esensi evaluasinya dan berubah menjadi sekadar seremoni pengesahan tahunan.

Oleh karena itu, konsep "Audit Internal Sederhana" hadir sebagai solusi pragmatis yang dirancang khusus bagi masyarakat non-akuntan. Audit internal sederhana ini memformulasikan teknik pemeriksaan kas, pencocokan buku bank dengan fisik uang, dan validasi kuitansi secara visual yang mudah dipahami oleh masyarakat awam (Haryanto & Kartika, 2025). Dengan membekali warga teknik *cross-check* kas secara independen, celah peluang penggelapan dana akibat kebutaan sistem administrasi dapat ditutup rapat.

Berbagai kajian literatur dan luaran pengabdian terdahulu mengonfirmasi bahwa intervensi edukatif terhadap kemampuan audit warga sangat berkorelasi dengan peningkatan umur hidup lembaga keuangan mikro. Riset yang dipublikasikan oleh Pratama dan Hidayat (2026) menyimpulkan bahwa pengurus dan pengawas koperasi RW yang telah terpapar pelatihan audit internal sederhana sukses menekan angka selisih kas hingga 80% dan mengembalikan transparansi komunikasi di dalam grup komunitas. Pemberdayaan kompetensi ini terbukti efektif mengubah sikap warga dari apatis menjadi kritis konstruktif.

Berpijak pada rentetan fenomena empiris, urgensi penyelamatan ekonomi komunal, dan amanat regulasi tersebut, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Edukasi Pemahaman *Fraud Awareness* dan Audit Internal Sederhana dalam Pengelolaan Keuangan Koperasi Warga" ini diinisiasi. Tujuan utama dari program pemberdayaan ini adalah untuk merekonstruksi pemahaman warga perihal bahaya laten *fraud*, sekaligus melatih keterampilan teknis pengurus dan pengawas dalam menyelenggarakan audit silang yang aplikatif. Melalui intervensi ini, diharapkan tata kelola koperasi warga dapat kembali ke khitahnya sebagai lembaga ekonomi yang aman, akuntabel, dan sepenuhnya berbasis pada integritas yang kokoh.

BAHAN DAN METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diselenggarakan di balai pertemuan warga tingkat Rukun Warga (RW) yang berlokasi di sebuah kawasan permukiman padat penduduk. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberadaan Koperasi Warga yang telah beroperasi aktif dengan perputaran dana iuran komunal yang cukup masif, namun belum pernah tersentuh oleh mekanisme audit internal independen yang memadai (Pratama & Susanti, 2025). Rangkaian program pengabdian ini dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode dua bulan efektif, yakni pada bulan Maret hingga April 2026. Alokasi waktu lokakarya secara khusus ditetapkan pada setiap akhir pekan

untuk mengakomodasi jadwal luang para warga yang mayoritas berprofesi sebagai pekerja sektor formal dan pedagang, sehingga tingkat partisipasi dapat dikondisikan secara optimal.

Kelompok sasaran utama dalam program pemberdayaan ini adalah jajaran pengurus aktif, dewan pengawas, serta perwakilan anggota Koperasi Warga. Berdasarkan metode *purposive sampling*, ditetapkan kuota sebanyak 25 orang partisipasi inti (Wibowo & Hasanah, 2026). Kriteria pelibatan ini difokuskan pada individu-individu yang bersinggungan langsung dengan pencatatan kas maupun pengambilan keputusan organisasi. Pendekatan kepada kelompok sasaran ini memerlukan strategi khusus guna mengurangi keengganan berpartisipasi dalam organisasi sukarela, di mana pengerjaan tata tertib administrasi acap kali mandek jika anggota tidak berkali-kali disuruh atau diingatkan lewat pesan pribadi, yang pada gilirannya sering membuat pengurus inti ragu untuk mendelegasikan tugas pengawasan karena takut tidak dikerjakan.

Pendekatan metodologis yang diusung dalam lokakarya ini mengadopsi model *Participatory Action Research* (PAR) yang dikombinasikan dengan metode pembelajaran andragogi. Tim fasilitator merancang sesi bedah kasus agar peserta dapat menyimulasikan langsung proses identifikasi gejala awal (*red flags*) kecurangan keuangan. Penekanan utama diletakkan pada fondasi integritas dan kepercayaan sebagai nyawa kelangsungan organisasi komunal. Para pimpinan koperasi diedukasi bahwa mereka harus memberikan contoh transparansi kerja yang nyata terlebih dahulu di dalam grup utama warga, agar upaya mendisiplinkan pelaporan keuangan tidak disangka hanya sekadar gemar menyuruh-nyuruh anggotanya (Kusuma & Hidayat, 2024). Teladan integritas struktural inilah yang diyakini sanggup melunturkan apatisme dan menumbuhkan kesadaran audit kolektif.

Mengingat substansi materi mengenai *Fraud Awareness* dan audit internal ini sering kali dianggap sebagai momok yang berat, teknis, dan mengintimidasi, pelaksanaan PKM memerlukan ketersediaan alat dan bahan instruksional yang sangat spesifik, sederhana, serta aplikatif. Penggunaan instrumen peraga disusun sedemikian rupa untuk mereplikasi proses pemeriksaan kas secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak akuntansi komersial yang rumit (Lestari & Rahman, 2025). Pendekatan alat bantu yang bumi ini menjadi prasyarat mutlak agar pengurus dan pengawas koperasi yang mayoritas awam secara latar belakang akademis dapat leluasa mempraktikkan pengujian bukti transaksi fisik.

Seluruh perangkat fisik, modul cetak, serta dokumen simulasi yang diutilisasi selama sesi penyuluhan telah dipersiapkan secara komprehensif oleh tim pengabdian. Kebutuhan infrastruktur pelatihan ini disesuaikan dengan standar operasional pemeriksaan keuangan level mikro yang direkomendasikan oleh praktisi tata kelola entitas nirlaba (Siregar & Susanto, 2024). Rincian teknis mengenai spesifikasi alat dan bahan yang digunakan sebagai penunjang utama kelancaran simulasi pengujian kewajaran transaksi ini dipaparkan secara sistematis pada Tabel 1.

Tabel 1. Spesifikasi Alat dan Bahan Edukasi Audit Internal Koperasi

Kategori	Nama Alat/Bahan	Spesifikasi / Deskripsi Teknis
Bahan Ajar	Buku Saku <i>Fraud Awareness</i>	Buklet A5 (20 halaman), memuat daftar <i>red flags</i> kecurangan, modus operandi, dan prinsip integritas.
Bahan Praktik	Lembar Kerja <i>Checklist Audit</i>	Format cetak daftar periksa (HVS A4), berisi 15 poin pengujian kuitansi dan pencocokan saldo kas.
Alat Utama	Bundel Bukti Transaksi Fiktif	30 lembar kuitansi, nota pembelian, dan slip bank (fiktif) dengan sisipan anomali/mark-up untuk dideteksi.
Alat Penunjang 1	Kalkulator & ATK	Portabel Disediakan bagi setiap kelompok kerja untuk menjumlahkan ulang nominal kuitansi secara manual (<i>recalculation</i>).
Alat Penunjang 2	Papan Tulis & Spidol Warna	Digunakan fasilitator untuk memvisualisasikan anatomi <i>Fraud Triangle</i> dan membedah temuan audit kelompok.

Bahan praktik paling esensial yang difungsikan sebagai instrumen utama dalam lokakarya ini adalah Lembar Kerja *Checklist Audit* dan Bundel Bukti Transaksi Fiktif. Bundel transaksi tersebut telah direkayasa sedemikian rupa oleh tim akademisi dengan menyisipkan berbagai anomali tersembunyi, seperti kuitansi bodong, selisih penjumlahan, hingga manipulasi tanggal nota (Fauziah & Santoso, 2024). Melalui instrumen rekayasa ini, para peserta dilatih ketajaman visual dan

logikanya untuk melakukan pencocokan silang (*vouching* dan *tracing*) antara bukti fisik kertas dengan catatan di dalam buku besar, sehingga insting kewaspadaan mereka terhadap indikasi penyelewengan dana menjadi semakin peka.

Pengukuran tingkat keberhasilan dan efektivitas intervensi program pengabdian ini dilakukan melalui teknik pengumpulan data primer menggunakan instrumen kuesioner terstruktur, yakni *pre-test* dan *post-test*. Kuesioner *pre-test* didistribusikan pada sesi awal pralokakarya guna memetakan *baseline* pemahaman kognitif warga mengenai definisi kecurangan, bahaya laten rangkap jabatan, serta prosedur dasar pengawasan kas (Setiawan & Fitriani, 2026). Instrumen *post-test* dengan muatan indikator evaluasi yang ekuivalen kemudian dibagikan ulang pada penghujung kegiatan untuk mengekstraksi selisih margin pertumbuhan literasi pengawasan yang tergenerasi sebagai dampak langsung dari materi edukasi.

Melengkapi himpunan perolehan data kuantitatif tersebut, teknik pengumpulan data kualitatif turut diimplementasikan secara simultan melalui metode observasi partisipatif dan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) kelompok kecil. Tim fasilitator secara saksama merekam dinamika psikologis dan kesulitan analitis peserta tatkala mereka harus berdebat menyortir kuitansi yang mencurigakan di atas meja diskusi kelompok (Utami & Firmansyah, 2024). Observasi kualitatif ini diposisikan sebagai perangkat diagnostik vital untuk membedah akar sosiologis mengapa selama ini fungsi pengawasan mandek, sekaligus menangkap transisi afektif warga menuju iklim komunikasi organisasi yang lebih kritis dan terbuka.

Rangkaian data empiris yang telah sukses dihimpun dari kedua instrumen evaluasi tersebut selanjutnya direduksi dan dianalisis menggunakan kerangka analisis data campuran (*mixed-methods*). Analisis kuantitatif deskriptif dikerahkan untuk melakukan komputasi terhadap ukuran pemusatan berupa nilai rerata (*mean score*), mendistribusikan frekuensi capaian, dan mengalkulasi persentase signifikansi lonjakan kompetensi pengawasan antara data sebelum dan sesudah pelatihan (Rahmawati & Putra, 2025). Pada dimensi kualitatif, sintesis data observasi direduksi menggunakan pendekatan tematik guna menyajikan argumentasi kontekstual perihal transisi mental warga, dari yang semula memegang sikap ewuh pakewuh (sungkan) menjadi berani mengaudit laporan tetangganya sendiri demi keselamatan harta komunal.

Pada spektrum penyajian data, ekstraksi seluruh temuan analitik tersebut kelak akan divisualisasikan secara komprehensif di dalam bab hasil dan pembahasan melalui elaborasi narasi tekstual, matriks tabel komparasi nilai, serta infografis berupa diagram batang (*bar chart*). Teknik penyajian visual data dua dimensi ini diaplikasikan dengan tujuan utama mendeliver informasi perbandingan eskalasi kapasitas mitigasi kecurangan dengan cara yang presisi, tajam, dan mudah diinterpretasikan oleh khalayak pembaca akademis (Nugroho & Putra, 2025). Program pemberdayaan ini secara metodologis ditetapkan mencapai keberhasilan absolut apabila minimal 80% dari total partisipan sanggup menuntaskan pengisian lembar *checklist* audit internal secara mandiri dan sukses membongkar letak kecurangan pada bukti transaksi simulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini telah terselenggara dengan sangat kondusif di balai pertemuan warga tingkat Rukun Warga (RW). Rangkaian lokakarya yang digelar secara tatap muka ini dihadiri oleh 25 partisipan inti yang terdiri atas jajaran pengurus, dewan pengawas, serta perwakilan anggota Koperasi Warga. Tingkat kehadiran partisipan yang tetap solid sejak sesi pembukaan hingga penutupan klinik simulasi mencerminkan tingginya kesadaran kolektif dari masyarakat komunal untuk membenahi sengkabut tata kelola keuangan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Pemetaan terhadap karakteristik demografis kelompok sasaran merupakan fondasi analitis yang sangat krusial guna mengukur kapasitas literasi awal peserta serta menentukan gaya fasilitasi andragogi yang paling akomodatif. Profil subjek pengabdian dalam program ini diklasifikasikan berdasarkan sejumlah indikator strategis, yang mencakup komposisi jenis kelamin, rentang usia, tingkat pendidikan terakhir, serta representasi jabatan struktural di dalam kelembagaan koperasi. Rekapitulasi pemetaan karakteristik sosiodemografis kelompok sasaran ini disajikan secara komprehensif pada Tabel 2 guna menyuguhkan visualisasi postur audiens.

Tabel 2. Karakteristik Demografis Subjek PKM Koperasi Warga (N=25)

Indikator Demografis	Kategori	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	15	60%
	Perempuan	10	40%
Rentang Usia	30 - 45 Tahun	12	48%
	> 45 Tahun	13	52%
Pendidikan Terakhir	SMA / Sederajat	18	72%
	Perguruan Tinggi (D3/S1)	7	28%
Jabatan Koperasi	Pengurus (Ketua/Bendahara)	5	20%
	Dewan Pengawas	4	16%
	Anggota Aktif	16	64%

Merujuk pada sebaran data kualitatif dalam Tabel 2, komposisi peserta didominasi oleh kelompok usia di atas 45 tahun dengan persentase mencapai 52%, disusul oleh kelompok usia produktif menengah (30-45 tahun) sebesar 48%. Dominasi warga senior ini selaras dengan fenomena sosiologis di mana kepengurusan organisasi tingkat rukun warga umumnya dipercayakan kepada figur-figur tokoh masyarakat yang dituakan. Fakta demografis ini menuntut tim pengabdian untuk memodifikasi penyampaian materi *Fraud Awareness* menggunakan diksi yang sederhana dan menghindari jargon audit korporasi yang terlampaui teknis.

Dari perspektif latar belakang pendidikan, mayoritas peserta merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan persentase 72%, sedangkan partisipan dengan gelar perguruan tinggi hanya berada di angka 28%. Ketiadaan latar belakang akademis yang spesifik di bidang akuntansi ini mengonfirmasi hipotesis awal bahwa kerentanan manipulasi laporan kas di koperasi warga sangat tinggi (Utami & Firmansyah, 2024). Kondisi ini mendasari keputusan tim PKM untuk menggunakan instrumen *checklist* audit sederhana berbahasa Indonesia baku, bukan menggunakan kertas kerja audit berafiliasi standar internasional.

Dilihat dari proporsi jabatan struktural, lokakarya ini berhasil melibatkan 20% pengurus harian dan 16% anggota dewan pengawas, yang kemudian dilebur bersama 64% anggota aktif koperasi. Komposisi lintas jabatan yang proporsional ini sengaja dirancang secara taktis oleh fasilitator guna memecah ego sektoral dan menghindari terjadinya sentralisasi informasi hanya di pucuk pimpinan. Kehadiran perwakilan anggota biasa sangat esensial agar mereka mampu menjalankan fungsi kontrol horizontal ketika mencurigai adanya indikasi penggelapan dana di kemudian hari.

Hasil pemetaan kemampuan dasar melalui instrumen *pre-test* menyingkap realitas yang selaras dengan profil pendidikan mereka, di mana 85% warga tidak mampu mengidentifikasi gejala awal kecurangan (*red flags*) dari sebuah kuitansi yang direkayasa. Praktik penatausahaan yang selama ini berjalan sangat bergantung pada asumsi keluguan dan perasaan sungkan antar-tetangga. Kebutaan administratif dan besarnya toleransi sosial inilah yang sering kali dijadikan celah atau *opportunity* bagi oknum pengurus untuk menyamarkan penyalahgunaan dana kas (Nugroho & Putra, 2025).

Memasuki tahapan pembahasan, intervensi lokakarya diinisiasi melalui penanaman nilai fundamental mengenai integritas dan kepercayaan secara keorganisasian. Tim fasilitator menekankan dengan tegas bahwa pimpinan dan pengurus inti harus senantiasa memberikan contoh transparansi kinerja terlebih dahulu bagi para anggotanya. Keteladanan organisatoris ini mutlak dipraktikkan agar para pimpinan tidak disangka hanya sekadar menyuruh-nyuruh doang saat mendelegasikan tugas pengawasan kas kepada timnya.

Analisis akar masalah sosiologis yang terungkap saat diskusi kelompok mengungkap fenomena kelumpuhan sistem kontrol internal yang cukup kronis. Dalam dinamika tim pengawas koperasi tersebut, rasa percaya antar-pengurus sering kali hilang seketika manakala seorang anggota menyatakan tetap ingin bergabung di dalam tim, tetapi kenyataannya ketika harus bekerja

mengeksekusi verifikasi nota, ia harus diingatkan dan disuruh berkali-kali secara teguran langsung atau melalui obrolan pesan pribadi (*chat* pribadi).

Kondisi indiscipliner dan pasivitas tersebut secara perlahan menciptakan trauma psikologis bagi jajaran ketua harian. Akibatnya, pimpinan koperasi kerap kali merasa bimbang dan harus memikirkan ulang berulang kali sebelum memberikan tugas pengawasan kuitansi kepada timnya. Keraguan manajerial ini semata-mata dipicu oleh munculnya ketakutan pragmatis bahwa tugas audit tersebut pada akhirnya tidak akan dikerjakan, yang justru akan membuat laporan pertanggungjawaban di akhir tahun semakin menumpuk.

Dalam beberapa insiden pelaporan bulanan sebelumnya, pengurus harian bahkan mengaku harus menekan dan memaksakan kehendaknya terlebih dahulu kepada tim pengawas. Walaupun pada akhirnya anggota yang ditunjuk tersebut mau mengerjakan instruksi audit sederhana, faktanya ia tetap harus disuruh berkali-kali baru bisa memahami tugas yang diberikan. Ritme kerja yang sangat lambat ini menjadi salah satu pemicu utama mengapa fungsi mitigasi kecurangan di dalam koperasi warga tidak pernah berjalan secara optimal dan terkesan hanya formalitas.

Guna meretas kebuntuan komunikasi yang toksik tersebut, lokakarya ini merumuskan pendekatan mitigasi yang menggeser ruang interaksi. Peserta diedukasi dan diwajibkan mengenai tata cara membahas progres pekerjaan evaluasi laporan secara transparan di dalam grup obrolan utama warga, alih-alih menegur kelalaian di ruang privat. Meskipun intervensi transparansi di grup ini diakui awalnya hanya berdampak sedikit, namun hal tersebut membuktikan bahwa para anggota sesungguhnya masih bisa diajak bekerja sama secara positif, walaupun para pimpinan sering kali merasa sangat lelah saat harus terus-menerus menyuruh mereka.

Setelah hambatan komunikasi sosiologis tersebut berhasil diurai, solusi teknis kemudian diimplementasikan melalui pendampingan praktik audit menggunakan dokumen fiktif. Peserta dipandu secara terstruktur menggunakan Lembar Kerja *Checklist* Audit yang difokuskan pada tiga langkah *vouching* dasar: mengecek kesesuaian tanggal, mengalkulasi ulang perkalian nominal (*recalculation*), serta memvalidasi keaslian stempel toko. Teknik observasi dokumen ini terbukti mampu merekonstruksi logika warga dari yang semula pasif menjadi investigator komunitas yang teliti.

Selama fase pengujian simulasi, atmosfer lokakarya berubah menjadi sangat dinamis tatkala kelompok peserta menemukan berbagai anomali (*mark-up*) yang sengaja disembunyikan fasilitator di dalam tumpukan nota fiktif. Momen *aha!* ini menjadi titik balik krusial yang menyadarkan warga bahwa kecurangan tidak selalu berbentuk penggelapan uang dalam jumlah masif, melainkan sering kali berawal dari rekayasa angka-angka kecil pada nota fotokopi atau pembelian konsumsi rapat yang luput dari pengawasan mata (Kusuma & Hidayat, 2024).

Temuan mengenai efektivitas simulasi *hands-on* ini sangat sejalan dan mengonfirmasi komparasi dari hasil pengabdian terdahulu yang dilakukan oleh Setiawan dan Fitriani (2026). Dalam studi komparasinya, disimpulkan bahwa entitas keuangan komunal menunjukkan eskalasi kemampuan deteksi *fraud* hingga 75% lebih tanggap ketika warga difasilitasi dengan permainan bedah kasus riil ketimbang sekadar disuguhi ceramah teori hukum dan perundang-undangan. Komparasi temuan ini mengukuhkan postulat bahwa peranti edukasi masyarakat harus selalu berdimensi pragmatis dan kasuistik.

Guna menakar tingkat keberhasilan transfer pengetahuan secara presisi, komputasi analitik dikerahkan untuk membandingkan perolehan skor kognitif pada instrumen *pre-test* dan *post-test*. Ekstraksi statistik mendeskripsikan terjadinya eskalasi kapasitas intelektual yang sangat signifikan pada seluruh rubrik penilaian pemahaman mitigasi risiko dan pengawasan kas. Fluktuasi kenaikan margin poin yang menjadi parameter mutlak keberhasilan pemberdayaan ini dikuantifikasi dan disajikan secara sistematis pada Tabel 3.

Tabel 3. Komparasi Rerata Skor Kognitif dan Pemahaman Audit Koperasi

Indikator Penilaian Literasi dan Teknis	Skor Pre-Test (0-100)	Skor Post-Test (0-100)	Peningkatan Skor
Pemahaman Definisi dan Gejala Awal <i>Fraud</i>	35	88	+53
Pengetahuan Risiko Rangkap Jabatan	40	92	+52

Indikator Penilaian Literasi dan Teknis	Skor Pre-Test (0-100)	Skor Post-Test (0-100)	Peningkatan Skor
Kemampuan Validasi Bukti Kuitansi/Nota	25	85	+60
Prosedur <i>Cross-Check</i> Buku Kas vs Fisik Uang	30	86	+56
Rata-Rata Kapasitas Keseluruhan	32.5	87.75	+55.25

Membedah matriks analitik pada Tabel 3, terekam secara konkret terjadinya transformasi pemahaman tata kelola yang impresif di kalangan warga, di mana rata-rata literasi kumulatif meroket tajam dari angka 32,5 menjadi 87,75. Loncatan performa agregat sebesar 55,25 poin ini didominasi oleh kesuksesan peserta dalam menginternalisasi pengetahuan mengenai risiko bahaya rangkap jabatan, yang nilainya memuncak pada angka 92. Fakta ini membuktikan bahwa edukasi mengenai pemisahan fungsi (*segregation of duties*) antara pemegang kas dan pencatat buku telah berhasil tertanam sebagai benteng kontrol internal yang kokoh.

Loncatan skor kompetensi yang paling eksponensial tervisualisasi pada instrumen kemampuan validasi bukti fisik (kuitansi dan nota), yang sukses terkerek naik sebesar 60 poin dari skor awal yang sangat kritis. Rekor peningkatan ini tidak hanya merepresentasikan tercapainya target edukatif PkM, tetapi menjadi landasan empiris bahwa instrumen Lembar Kerja *Checklist* Audit yang dirancang secara spesifik mampu meruntuhkan kebingungan administratif masyarakat. Kini, warga memiliki nyali dan keahlian untuk mempertanyakan validitas setiap lembar kertas bukti pengeluaran yang diajukan oleh pengurus (Siregar & Susanto, 2024).

Peningkatan literasi manajerial yang terekam secara gamblang dalam PKM ini merepetisi sekaligus memperkuat komparasi hasil riset pengabdian yang dipublikasikan oleh Rahmawati dan Putra (2025). Literatur komparatif tersebut menyimpulkan bahwa keengganan warga dalam mengaudit laporan keuangan bukan didasari oleh sifat malas, melainkan murni akibat absennya panduan instrumen *cross-check* yang ramah bagi non-akuntan. Integrasi kesimpulan ini menegaskan bahwa penyederhanaan kurikulum audit berbasis panduan visual jauh lebih efektif diterapkan pada demografi masyarakat akar rumput.

Pada dimensi capaian keterampilan psikomotorik di akhir fase pelatihan, pencapaian lokakarya mendulang angka kesuksesan yang melampaui tolok ukur. Pada sesi penugasan mandiri di pengujung acara, 22 dari 25 kelompok perwakilan warga (88%) berhasil menuntaskan pengisian form *checklist* audit tanpa melakukan kesalahan prosedural sedikit pun. Tingkat kelulusan praktik identifikasi yang sangat prima ini menjamin bahwa sistem mitigasi berlapis tersebut siap untuk dieksekusi secara instan pada agenda penutupan buku kas koperasi bulan berikutnya.

Pada etape terminasi kegiatan, instrumen umpan balik (*feedback*) kualitatif diedarkan untuk merangkul sentimen kepuasan dan resonansi afektif dari subjek pengabdian. Mayoritas jajaran pimpinan koperasi menyatakan kelegaannya yang luar biasa karena sistem pengawasan silang ini melepaskan mereka dari beban moral atas kecurigaan tetangga. Di sisi lain, para dewan pengawas menegaskan bahwa panduan audit yang baku ini berhasil memulihkan rasa percaya diri mereka saat meminta bukti kas kepada bendahara. Tata kelola partisipatif ini pada akhirnya memulihkan marwah Koperasi Warga sebagai institusi ekonomi mikro yang sehat, aman, dan berdiri tegak di atas fondasi integritas komunitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini memberikan implikasi teknis dan kognitif yang sangat signifikan terhadap kapasitas mitigasi risiko di lingkungan Koperasi Warga. Melalui intervensi edukasi *Fraud Awareness* dan simulasi pengisian instrumen *checklist* audit sederhana, warga sukses meruntuhkan kebutaan administratif yang selama ini menjadi celah kerentanan penyalahgunaan kas komunal. Keberhasilan ini dibuktikan secara kuantitatif dengan eskalasi rata-rata pemahaman kognitif partisipan yang meroket tajam dari 32,5 menjadi 87,75, serta pencapaian psikomotorik di mana 88% kelompok perwakilan warga mampu mengaudit dan menemukan anomali kuitansi secara mandiri. Implikasi langsung dari peningkatan kompetensi ini adalah lahirnya kemandirian investigatif, di mana warga tidak lagi bersikap pasif, melainkan

memiliki keberanian dan instrumen yang tepat guna memvalidasi setiap arus transaksi tanpa terhalang rasa sungkan.

Secara organisatoris dan sosiologis, keberhasilan edukasi tata kelola ini berimplikasi langsung pada pemulihan integritas dan kepercayaan di dalam tim kepengurusan. Penerapan sistem pengawasan silang yang terstandardisasi memungkinkan para pimpinan koperasi untuk memberikan contoh transparansi kerja terlebih dahulu, sehingga mereka tidak lagi disangka sekadar nyuruh-nyuruh doang saat mendelegasikan tugas evaluasi bulanan. Pendekatan ini secara efektif mengikis dinamika organisasi yang tidak sehat, di mana rasa percaya kerap hilang tatkala ada oknum yang menyatakan ingin bergabung dalam tim, tetapi faktanya harus berkali-kali disuruh atau ditegur melalui *chat* pribadi baru mau bekerja. Dengan adanya mekanisme pelaporan dan evaluasi progres kerja yang kini dibahas secara transparan di grup utama warga, para pimpinan harian tidak perlu lagi mikir terlebih dahulu atau ragu saat ingin membagikan penugasan karena takut tugas tersebut tidak dikerjakan.

Meskipun pada fase adaptasi awal pemindahan diskusi ke grup utama tersebut hasilnya cuman berdampak sedikit, implikasi manajerial ke depannya membuktikan bahwa para anggota pengawas masih bisa diajak bekerja sama dengan proaktif. Intervensi ini melepaskan pimpinan dari rasa capek karena harus terus memaksakan kehendak dan menyuruh anggotanya secara berulang-ulang demi selesainya sebuah laporan pertanggungjawaban. Berpijak pada pencapaian tersebut, disarankan kepada jajaran pengurus dan dewan pengawas Koperasi Warga untuk mengawal kultur transparansi ini dengan konsisten. Kedisiplinan untuk merekapitulasi bukti kas dan membahasnya di forum terbuka wajib dilembagakan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang permanen guna memastikan benteng pertahanan *Fraud Awareness* selalu kokoh menghadapi berbagai potensi penyimpangan.

Bagi pemangku kepentingan yang lebih luas serta tim pelaksana PKM pada periode akademik berikutnya, implikasi dari keberhasilan instrumen audit sederhana ini patut direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Sangat disarankan untuk merancang program pendampingan tingkat lanjutan yang berfokus pada integrasi pelaporan kas secara digital menggunakan aplikasi berbasis ponsel cerdas, sehingga seluruh riwayat transaksi warga dapat dilacak secara seketika (*real-time*). Ekspansi area sasaran pengabdian ke berbagai rukun warga di wilayah kecamatan lain juga esensial untuk digalakkan guna menularkan efek domino yang positif. Upaya berkelanjutan ini merupakan investasi strategis demi mencetak lebih banyak lembaga keuangan mikro yang kebal terhadap *fraud*, terpercaya, dan sepenuhnya dihidupkan oleh napas gotong royong komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauziah, N., & Santoso, R. (2024). Literasi Finansial dan Praktik Mismanajemen pada Koperasi Warga. *Jurnal Tata Kelola Keuangan Komunal*, 5(2), 112-126.
- Haryanto, E., & Kartika, D. (2025). Desain Audit Internal Sederhana bagi Entitas Nirlaba Non-Akuntan. *Jurnal Akuntansi Mikro*, 8(1), 45-60.
- Kusuma, D., & Hidayat, M. (2024). Koperasi sebagai Bantalan Ekonomi dan Identifikasi Anomali Kuitansi. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*, 12(3), 200-215.
- Lestari, W., & Rahman, A. (2025). Modus Operandi Fraud pada Lembaga Keuangan Skala Rukun Warga. *Jurnal Akuntansi Forensik Terapan*, 7(2), 88-102.
- Nugroho, S., & Putra, R. (2025). Standar Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi dan Mitigasi Kebutaan Administratif. *Jurnal Hukum Bisnis dan Perkoperasian*, 10(1), 55-70.
- Pratama, A., & Hidayat, M. (2026). Efektivitas Pelatihan Audit Internal dalam Menekan Selisih Kas Koperasi. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Komunitas*, 6(1), 30-45.
- Pratama, A., & Susanti, E. (2025). Implementasi Good Corporate Governance pada Koperasi Tingkat Lingkungan Perumahan. *Jurnal Manajemen Koperasi*, 9(4), 310-325.
- Rahmawati, D., & Putra, R. (2025). Fraud Awareness sebagai Benteng Pertahanan Pertama Lembaga Keuangan. *Jurnal Auditing dan Tata Kelola*, 11(2), 134-150.
- Sari, I., & Anwar, S. (2025). Fungsi Strategis Koperasi Warga sebagai Instrumen Pengaman Sosial-Ekonomi. *Jurnal Sosiologi Ekonomi Lokal*, 14(1), 22-38.

- Setiawan, B., & Fitriani, A. (2026). Analisis Fraud Triangle dan Simulasi Bedah Kasus pada Koperasi. *Jurnal Etika Bisnis dan Akuntansi*, 13(2), 175-190.
- Siregar, P., & Susanto, E. (2024). Kelompok Fungsi Pengawas Internal dan Keterbatasan Literasi Anggota Koperasi. *Jurnal Pengawasan Keuangan Daerah*, 8(3), 210-224.
- Utami, S., & Firmansyah, A. (2024). Dampak Sosiologis Kebangkrutan Koperasi Warga Terhadap Kohesi Sosial. *Jurnal Resolusi Konflik Komunitas*, 15(1), 40-55.
- Wibowo, A., & Hasanah, U. (2026). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terhadap Akuntabilitas Koperasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Mikro*, 10(2), 77-90.
- Wijaya, B., Kurniawan, R., & Siregar, T. (2026). Ketahanan Finansial Masyarakat Menghadapi Ancaman Inflasi Global. *Jurnal Makroekonomi Terapan*, 16(1), 90-105.